

PRAKTIK PATRONASE DAN ANCAMANNYA BAGI DEMOKRASI BERDASARKAN PERSPEKTIF MAHASISWA UNIMED

Angela Nathalia Zalukhu¹, Dumaris Elsy Pakpahan², Grace Romauli Pasaribu³,
Magda Hogma Hutasoit⁴, Maria Natalia Sitanggang⁵, Wildan Mukhalladun T⁶, Julia
Ivanna⁷

angelanathalia73@gmail.com¹, pakpahanmaris@gmail.com², gracepasaribu88@gmail.com³,
magdahutasoit519@gmail.com⁴, mariasitanggang404@gmail.com⁵,
wildanmukhalladun73@gmail.com⁶, juliaivanna@unimed.ac.id⁷

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang praktik patronase dan ancamannya terhadap demokrasi di Indonesia berdasarkan perspektif mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED). Patronase dipahami sebagai hubungan timbal balik antara pihak berkuasa (patron) dan masyarakat (klien) yang melibatkan imbalan berupa uang, jabatan, atau fasilitas tertentu sebagai balasan atas dukungan politik. Fenomena ini sering terjadi menjelang pemilihan umum, di mana suara rakyat dijadikan alat transaksi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka terhadap delapan mahasiswa dari berbagai fakultas di UNIMED. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik patronase masih banyak terjadi dalam bentuk politik uang dan balas jasa yang berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi. Dampak tersebut meliputi menurunnya kepercayaan publik, melemahnya prinsip keadilan dan transparansi, serta meningkatnya potensi korupsi. Mahasiswa UNIMED menilai bahwa patronase merupakan ancaman serius bagi demokrasi karena menjadikan politik sebagai transaksi, bukan perjuangan untuk kepentingan rakyat. Mereka juga menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawasi jalannya proses politik, meningkatkan kesadaran kritis, serta menolak segala bentuk praktik patronase. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan patronase perlu dilakukan melalui pendidikan politik, penegakan hukum yang tegas, reformasi sistem politik, dan partisipasi aktif generasi muda agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan bersih, adil, dan berintegritas.

Kata Kunci: Patronase, Demokrasi, Politik Uang, Mahasiswa.

ABSTRACT

This study examines the practice of patronage and its threats to democracy in Indonesia, based on the perspective of students at the State University of Medan (UNIMED). Patronage is understood as a reciprocal relationship between those in power (patrons) and the public (clients) involving rewards in the form of money, positions, or certain facilities in exchange for political support. This phenomenon often occurs in the lead-up to general elections, where the people's votes are used as a tool for political transactions. This study used qualitative methods with data collection techniques through interviews, observations, and literature studies with eight students from various faculties at UNIMED. The results show that patronage practices are still prevalent in the form of money politics and kickbacks, which have a negative impact on the quality of democracy. These impacts include declining public trust, weakening the principles of justice and transparency, and increasing the potential for corruption. UNIMED students assess that patronage is a serious threat to democracy because it turns politics into a transaction, rather than a struggle for the interests of the people. They also emphasize the importance of students' role in monitoring the political process, increasing critical awareness, and rejecting all forms of patronage practices. This study concludes that eradicating patronage requires political education, firm law

enforcement, political system reform, and the active participation of the younger generation to ensure democracy in Indonesia runs cleanly, fairly, and with integrity.

Keywords: *Patronage, Democracy, Money Politics, Students.*

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia seharusnya berjalan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan partisipasi rakyat. Namun, dalam kenyataannya masih sering muncul masalah yang bisa merusak kualitas demokrasi. Salah satu masalah itu adalah praktik patronase, yaitu hubungan timbal balik antara pihak yang punya kekuasaan atau sumber daya dengan masyarakat, biasanya melalui pemberian uang, bantuan, atau janji tertentu sebagai imbalan dukungan politik (Rosana, 2016).

Praktik patronase sering terlihat menjelang pemilu, di mana suara rakyat dianggap sebagai barang yang bisa ditukar dengan fasilitas atau janji. Hal ini membuat politik tidak lagi fokus pada ide, program, atau kepentingan rakyat, tetapi lebih pada kepentingan kelompok tertentu. Jika terus dibiarkan, patronase akan melahirkan politik transaksional yang jauh dari nilai keadilan dan transparansi.

Patronase jelas menjadi ancaman bagi demokrasi karena merusak kepercayaan publik terhadap pemimpin dan sistem politik. Keputusan politik tidak lagi berdasarkan kemampuan atau kepentingan masyarakat, melainkan pada balas jasa dan kepentingan sempit. Akibatnya, demokrasi hanya menjadi formalitas, sementara substansinya hilang (Jekson Saragih, 2024).

Bagi mahasiswa UNIMED, persoalan ini penting untuk dikaji karena mahasiswa adalah generasi muda yang kritis dan peduli pada masa depan bangsa. Melalui pemahaman tentang patronase dan dampaknya, mahasiswa diharapkan mampu berperan dalam mengawasi jalannya demokrasi, mengkritisi praktik politik yang tidak sehat, serta ikut mendorong terciptanya demokrasi yang lebih bersih, adil, dan berpihak pada rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena praktik patronase dan ancamannya terhadap demokrasi dari perspektif mahasiswa Unimed. Studi kasus akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas hubungan antara patronase, demokrasi, dan pandangan mahasiswa secara rinci (Irfandi Setiawan, 2022). Pengumpulan data akan melibatkan wawancara mendalam dengan mahasiswa Unimed yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan atau pengetahuan mereka tentang isu-isu terkait patronase dan demokrasi. Selain itu, analisis dokumen seperti artikel berita, laporan organisasi mahasiswa, dan media sosial juga akan dilakukan untuk memperkaya data dan memberikan konteks yang lebih luas.

Analisis data akan dilakukan secara tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan kategori-kategori yang muncul dari data wawancara dan dokumen. Proses ini melibatkan transkripsi wawancara dan interpretasi makna yang terkandung dalam data. Validitas data akan diuji melalui triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai sumber data dan metode pengumpulan data. Selain itu, peneliti juga akan melakukan member checking, yaitu

meminta peserta wawancara untuk meninjau dan memberikan umpan balik terhadap interpretasi peneliti terhadap pandangan mereka. Dengan demikian, penelitian ini akan berusaha untuk menyajikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang perspektif mahasiswa Unimed mengenai praktik patronase dan ancamannya bagi demokrasi.

Dalam penelitian ini, populasi yang dituju adalah mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed). Sampel akan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria inklusi mahasiswa yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan isu patronase dan demokrasi, serta representasi dari berbagai fakultas dan program studi di Unimed. Dengan demikian, diharapkan sampel yang diperoleh akan mampu mewakili keberagaman perspektif mahasiswa Unimed terkait isu yang diteliti.

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika patronase dan demokrasi di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi pendidikan politik yang lebih efektif, serta untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam upaya menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia (Rohmah, 2023). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi dan kepentingan mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Praktik patronase dalam dunia politik Indonesia, yang dilihat dari perspektif mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED), merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan karena telah menggerus kualitas demokrasi. Patronase didefinisikan sebagai hubungan timbal balik yang tidak setara antara patron-elit atau aktor yang memiliki sumber daya dan klien-masyarakat atau pendukung yang bergantung pada patron tersebut. Dalam praktiknya, patronase sering kali berbentuk pemberian uang, fasilitas, atau jabatan kepada masyarakat sebagai imbalan dukungan politik terutama saat pemilu. Hal ini menjadikan suara rakyat tidak lagi bernilai sebagai ekspresi aspirasi politik yang tulus, melainkan menjadi komoditas yang diperjualbelikan secara materiil. Mahasiswa menilai bahwa kondisi ini merusak prinsip dasar demokrasi yang mengharuskan keterbukaan, keadilan, dan partisipasi bermakna dari seluruh rakyat.

Dampak patronase terhadap demokrasi sangat luas dan serius. Praktik ini menyebabkan legitimasi pemerintahan yang terpilih menjadi dipertanyakan, karena pemilih cenderung memilih berdasarkan keuntungan materi, bukan berdasarkan visi, misi, atau program kandidat. Selain itu, patronase memicu praktek politik identitas dan memperlebar kesenjangan sosial-politik yang dapat menimbulkan polarisasi serta konflik horizontal dalam masyarakat. Patronase menciptakan dominasi elit yang menghambat partisipasi warga yang kurang mampu untuk terlibat secara nyata dalam proses politik, sehingga demokrasi berubah menjadi arena yang eksklusif dan tidak inklusif. Mahasiswa UNIMED melihat bahwa konsekuensi negatif ini menyebabkan demokrasi menjauh dari cita-cita dasar sebagai sistem pemerintahan rakyat.

Pandangan kritis mahasiswa terhadap patronase juga mengungkap bahwa patronase tidak lagi hanya terpusat pada saat pemilu saja, melainkan sudah meresap ke dalam kehidupan politik dan birokrasi sehari-hari di Indonesia. Mereka mencatat bagaimana pola patronase yang asimetris mendominasi pengambilan keputusan politik, di mana mayoritas keputusan lahir dari kepentingan balas jasa dan hubungan personal yang pragmatis, bukan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi rakyat secara luas. Fenomena ini melemahkan institusi demokrasi karena mengikis transparansi dan akuntabilitas serta memperbesar ketidaksetaraan dalam pengelolaan kekuasaan. Mahasiswa percaya bahwa jika praktik ini tidak diberantas, demokrasi Indonesia akan kehilangan integritasnya dan hanya menjadi kedok formalitas semu.

Upaya pemberantasan patronase menurut mahasiswa harus menyasar bukan hanya pada pencegahan politik uang, tetapi juga transformasi sistem politik secara menyeluruh. Pendidikan politik yang intensif dan partisipasi aktif mahasiswa sebagai agen perubahan menjadi kunci dalam membangun kesadaran masyarakat akan bahaya patronase. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik patronase serta transparansi dalam proses pemilu adalah langkah penting yang harus didukung bersama. Mengurangi tinggi biaya politik dan memperkuat kelembagaan partai politik agar lebih ideologis dan programatik juga menjadi rekomendasi utama untuk mengurangi ketergantungan politik terhadap patronase.

Fenomena patronase tidak bisa dilepaskan dari faktor sosial dan struktural dalam kehidupan politik Indonesia. Mahasiswa melihat tingginya biaya politik dan lemahnya kelembagaan partai membuat kandidat-kandidat cenderung menggunakan patronase sebagai jalan pintas untuk meraih kemenangan politik. Ditambah lagi, budaya timbal balik dalam masyarakat yang menganggap wajar adanya bantuan politik sebagai bagian dari tradisi sosial memperkuat praktik ini. Oleh karena itu, reformasi yang melibatkan perbaikan institusi dan perubahan budaya politik mutlak diperlukan agar patronase dapat diminimalkan dan demokrasi dapat berjalan pada jalur yang sehat.

Menurut mahasiswa UNIMED, patronase merupakan ancaman nyata yang berpotensi mengubah demokrasi dari sistem pemerintahan rakyat menjadi sistem pemerintahan oleh elit penguasa. Praktik ini tidak hanya merusak prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas, tetapi juga mengurangi makna demokrasi itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan dan kritik yang kuat dari masyarakat, terutama generasi muda dan akademisi, patronase akan terus melemahkan proses demokrasi dan menjadikan politik sebagai ajang transaksi yang merugikan rakyat umum. Mahasiswa menekankan perlunya gerakan kolektif dan berkelanjutan untuk menghapus patronase dan menegakkan demokrasi yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat posisi mahasiswa sebagai pengawas kritis yang sangat dibutuhkan dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia. Patronase bukan hanya isu politik jangka pendek, melainkan persoalan sosial yang berakar pada struktur dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan harus bersifat komprehensif, mencakup reformasi kelembagaan, pendidikan politik, penegakan hukum, dan perubahan kultur politik untuk mewujudkan demokrasi yang bersih, adil, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran aktif mahasiswa menjadi modal utama dalam mengawal demokrasi agar konsisten pada prinsip-prinsip dasarnya dan bebas dari praktik patronase yang merusak.

KESIMPULAN

Praktik patronase dalam sistem politik Indonesia, yang diamati dari perspektif mahasiswa UNIMED, jelas merupakan ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Patronase mengubah politik menjadi hubungan transaksional yang tidak adil, di mana suara rakyat diperjualbelikan melalui pemberian uang, fasilitas, atau jabatan sebagai imbalan dukungan politik. Hal ini menyebabkan pemilu dan proses demokrasi kehilangan esensinya karena kandidat yang menang bukan berdasarkan kompetensi dan kualitas kepemimpinan, melainkan pada kemampuan finansial dan jaringan patron-klien. Akibatnya, legitimasi pemerintahan yang terbentuk menjadi diragukan dan prinsip keadilan, keterbukaan, serta partisipasi bermakna dalam demokrasi menjadi hilang. Patronase juga memperkuat dominasi elit politik dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses kekuasaan, yang berpotensi merusak stabilitas dan persatuan sosial.

Dampak negatif patronase tidak hanya berhenti pada proses pemilu, tetapi juga mengakar dalam kehidupan politik dan birokrasi sehari-hari sehingga melemahkan institusi demokrasi. Praktik balas jasa yang terjadi, seperti pemberian jabatan dan proyek berdasarkan kedekatan politik, menimbulkan ketidakadilan dan meningkatkan peluang korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Mahasiswa menyatakan bahwa fenomena ini menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan menggeser demokrasi menjadi formalitas semu tanpa substansi yaitu pengelolaan negara yang adil dan transparan. Oleh karena itu, pemberantasan patronase harus menjadi agenda utama bersama, melibatkan pendidikan politik yang intensif, penguatan partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas. Reformasi kelembagaan partai dan pengurangan biaya politik juga penting untuk menekan ketergantungan pada politik patronase dan membangun demokrasi yang sehat.

Sebagai generasi muda dan agen perubahan, mahasiswa UNIMED memiliki peran strategis dalam mengawal kualitas demokrasi dengan secara aktif menolak dan mengkritisi praktik patronase. Kesadaran kritis mahasiswa terhadap ancaman patronase menjadi modal utama untuk mendukung terciptanya demokrasi yang lebih bersih, adil, dan berpihak pada rakyat banyak. Peran aktif mahasiswa dalam edukasi politik dan pengawasan sosial harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan akademisi untuk mencapai perubahan struktural dan kultural yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Irfandi Setiawan, I. R. (2022). PATRONASE DAN KLIENTALISME POLITIK (Studi Pada Masyarakat Daerah Pemilihan I, Kabupaten Bangka di Pemilihan Legislatif 2019). *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1255-1262.
- Jekson Saragih, P. W. (2024). Demokrasi Patronase Dan Praktik Politik Uang : Pengalaman Pilkada Sumut Oleh Mahasiswa PPKN Unimed. *Public Service And Governance Journal*.
- Rohmah, E. I. (2023). Praktik Patronase dalam Pemilu dan Implikasinya Terhadap Kredibilitas Demokrasi di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 91-111.
- Rosana, E. (2016). NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal TAPIS*..